

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia ini dikategorikan dengan negara maju dan negara berkembang. Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang kaya akan banyak penduduk, pulau, dan sektor pariwisata. Terbukti dengan banyaknya penduduk Indonesia yang dapat menikmati sektor wisata dan banyak turis asing yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati sektor pariwisata.

Menurut Amnar dkk., (2017) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditunjang oleh beberapa sektor yang terus berkembang untuk menunjukkan adanya pendapatan yang meningkat agar menjadi Indonesia yang maju, di antaranya yaitu dari sektor pariwisata. Negara Indonesia kaya akan memiliki sektor pariwisata yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dengan adanya sektor pariwisata (Arifin dkk., 2017).

Menurut Suryani (2017) mengungkapkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia merupakan penghasil devisa terbesar dengan menghasilkan kontribusi pembangunan. Pembangunan ini muncul dikarenakan terdapat sektor pariwisata, yang dapat menyentuh dan melibatkan masyarakat, diungkapkan oleh (Eman dkk., 2018).

Dengan adanya pembangunan sektor pariwisata maka masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya, yaitu adanya pembukaan lowongan pekerjaan. Menurut (Yanti & Hadya, 2018) mengungkapkan bahwa mengharapkan sektor pariwisata dapat memimpin di bidang pembangunan karena Negara Indonesia

memiliki peningkatan dalam sektor pariwisata. Banyaknya pembangunan sektor pariwisata pembangunan sektor pariwisata yang maju maka akan berpengaruh terhadap pemerintah. Menurut Anwar (2012) penduduk miskin di Bangladesh mengungkapkan bahwa pariwisata berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pariwisata perekonomian masyarakat miskin di Bangladesh, nilai sosial budaya masyarakat lokal mampu dipertahankan dari adanya pengaruh asing dan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan dari pariwisata itu sendiri ialah untuk mengupayakan maksimalnya partisipasi masyarakat dalam sektor pelayanan wisata dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta terciptanya keanekaragaman budaya (Weeden, 2014) dalam (Rasdi, et al 2019).

Melihat dari penelitian sebelumnya menurut Atan & Arslanturk (2012) dalam Amnar et al., (2017) mengungkapkan bahwa pariwisata diukur karena adanya perkembangan dari pariwisata, yaitu dengan adanya restoran dan perhotelan yang terus berkembang secara pesat yang nantinya memberikan kontribusi melalui pajak restoran dan hotel di Turkey. Penting dilakukan promosi yang terencana dan teratur dalam meningkatkan masyarakat lokal untuk mengetahui objek wisata secara langsung maupun tidak langsung (Kamaru dkk., 2017). Pariwisata sangat bergantung pada keindahan dan keramahan dari tempat dan masyarakat tempat mengelola (Frey & George, 2010). Pariwisata memiliki aktivitas yang digunakan untuk beberapa kalangan masyarakat untuk bersenang-senang dan untuk mendapatkan kepuasan dalam naluri manusia yang terjadi. Dengan adanya pariwisata dapat memengaruhi kualitas hidup pada masyarakat (Andereck &

Nyaupane, 2011). Dengan dijalankan penerapan otonomi daerah terbentuklah partisipasi dan kemandirian masyarakat namun penting dibutuhkan seorang pemimpin yang mengerti tentang kondisi masyarakat dalam pemerintah daerahnya (Cahyo, 2017).

Menurut Bryden (1973) dalam Darmawan & Yunanto (2016) mengungkapkan dengan adanya pembangunan pariwisata dan pertumbuhan perekonomian maka mendapatkan hubungan mutualisme untuk mengentaskan kemiskinan. Pihak penerimaan keuangan dapat dimanfaatkan pada daerah dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkannya yaitu bisa dengan memberikan modal usaha bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur, aksesibilitas jalan dan renovasi bangunan wisata. Menurut Aydin (2016) Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan pariwisata di Turki.

Peningkatan jumlah wisata diiringi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, karena wisatawan banyak mengunjungi daerah tujuan yang bervariasi (Syartika & Mardianis, 2018). Menurut Prakoso dkk., (2019) mengungkapkan kondisi daerah dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksana pemerintah dan pelayanan pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan pada sebuah pariwisata di pemerintah daerah juga bisa berperan untuk perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat (Soleh, 2018). Terdapat indikator ekonomi sektor pariwisata yaitu pekerjaan, pendapatan, investasi, dan neraca pembayaran (Cardoso & Ferreira, 2000). Pariwisata tumbuh secara global sebagai pemberi manfaat bagi bisnis dan menjadikan sebagai destinasi (Farmaki et al., 2014).

Pariwisata yang ada di Indonesia merupakan pemberian amanah dari Allah SWT yang sangat berpotensi, beragam dan harus dijaga dengan baik oleh manusia. Hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an Allah SWT yaitu Al-Mulk (67) Ayat 15, yang berbunyi :

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ طَرْفُ رِزْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَنَّاكِبَهَا فِي فَا مَشُوا ذُلُولا الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya :

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (*Al-Qur'an Surah Al-Mulk Ayat 15*).

Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang haq, tidak ada sekutu baginya, kuasanya, nikmatnya dan memperingatkan dari kecenderungan kepada dunia. Allah SWT ialah Dzat yang mudah bagimu untuk hidup dan mengambil manfaat darinya. Makanlah apa yang diberi oleh Allah SWT dan hanya kepadanya lah dibangkitkan dan dikembalikan untuk dihisab dan dibalas.

PAD diperoleh dari empat kategori, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain dari PAD yang sah. Kebijakan keuangan daerah berguna dengan adanya peningkatan PAD untuk digunakan pada daerahnya dalam adanya pelaksanaan pemerintah, pengelolaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dalam pemerintah pada daerahnya. Bahwa kunci utama pemerintah daerah yaitu adanya PAD yang diperoleh dari pajak dan retribusi, kemudian digunakan untuk sumber daya manusia dan adanya pembangunan infrastruktur (Montolalu dkk., 2017). Pembiayaan otonomi daerah pada PAD yaitu termasuk aspek utama, diungkapkan oleh (Lakoy dkk., 2016).

Sumber dalam pembiayaan mengenai pembangunan nasional tidak terlepas dari penerimaan pajak dan retribusi karena sangat berpengaruh dengan adanya pendapatan daerah (Manuputty dkk., 2019). Diungkapkan oleh Rooy & Budiarmo (2015) bahwa sumber penerimaan keuangan PAD diperoleh dari potensi yang ada di daerah, misalkan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain serta penerimaan keuangan diatur oleh peraturan daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Kepariwisata, 2009) di dalam Pasal 1 Ayat 10 membahas terkait Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Negara Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi yang merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya sistem desentralisasi, maka muncul otonomi bagi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang 1945 Pasal 18 Ayat 2 berisi tentang Pemerintah Daerah mengurus urusan sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugasnya (Pratolo & Jatmiko, 2017). Menurut Utami & Ningsih (2018) mengungkapkan bahwa di setiap daerah diberikan wewenang dalam mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri, dituntut untuk mencari sumber pendapatan melalui PAD.

Objek wisata alam yang mampu tumbuh karena dikelola secara baik oleh pemerintah daerah maka akan berpengaruh terhadap banyaknya wisatawan yang ingin mengunjungi dan menikmati objek wisata alam. Tidak hanya dari masyarakat setempat yang dapat berkunjung dan menikmati tetapi dari masyarakat wilayah lain dapat berkunjung dan menikmatinya. Dengan banyaknya wisatawan, maka akan berpengaruh terhadap retribusi dari objek wisata alam. Pemerintah daerah harus bisa memperhatikan objek wisata alam, karena dapat memiliki manfaat yang baik pada hasil retribusi objek wisata alam yang nantinya pemerintah lebih baik dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Purbalingga yang merupakan sebuah Kabupaten berlokasi di Provinsi Jawa Tengah terkenal karena memiliki yang kekayaan dalam sektor wisata alam. Para wisatawan yang berkunjung tidak hanya dari Kabupaten Purbalingga saja, namun banyak dari luar Kabupaten Purbalingga yang berkunjung untuk menikmati keindahan alam saja dan bisa menambah ilmu pengetahuan dari objek wisata alam tersebut. Objek wisata alam di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah antara lain yaitu gua lawa, pendakian gunung slamet, wana wisata serang, curug duwur, curug sembari, *campingground*, rest area lembah asri, rafting dan tubing, curug silintang, pemandian situ tirta marta desa wisata karangcegak, susur sungai klawing, curug nini, curug singongoh, hiking, dan lain-lain.

Dengan banyaknya keanekaragaman objek wisata alam di Kabupaten Purbalingga, ternyata di sana juga memiliki tingkat perekonomian yang masih dikategorikan kurang berkecukupan atau terdapatnya angka kemiskinan. Menurut Muzaki (2017) mengungkapkan bahwa terdapat di Kabupaten Purbalingga tercatat

data terakhir yaitu 19,70 % dengan garis kemiskinan Rp 283.366 dan mendapat peringkat ke empat di Jawa Tengah, Tasdi mengaku telah menekankan angka kemiskinan dengan memperbaiki Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dan membangun 4.710 jamban rumah tangan miskin. Kabupaten Purbalingga memiliki angka kemiskinan dengan nilai 18,8% pada posisi keempat dari lima belas Kabupaten atau Kota Jawa Tengah dengan kemiskinan tertinggi dan Menduduki posisi pertama pada Kabupaten Wonosobo (20,32%), yang kedua Kabupaten Kebumen (19,6%), dan yang ketiga Kabupaten Brebes (19,14%) diinformasikan dalam portal (Katadata.co.id, 2018).

Pada tahun 2019, Dikutip dari portal berita daring (News, 2019) terdapatnya adanya inflasi. Hal tersebut menjadi faktor pemicu Kabupaten Purbalingga bisa menjadi yang memiliki penduduk miskin di Jawa Tengah, menurut Bupati Tiwi mengatakan bahwa adanya penanganan kemiskinan di tahun 2019 dengan persoalan Inflasi terhadap *Poverty Line* atau garis kemiskinan sangat berpengaruh, memiliki kenaikan dari Rp 313.343 menjadi Rp 324.735 per kapita per bulan. Informasi pada bulan April tahun 2019 (Rakyat, 2019) tentang adanya 49 desa di Purbalingga masuk zona merah kemiskinan, dari 239 desa/kelurahan di 18 kecamatan, salah satu zona merah adalah Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang berpenduduk hampir 13.000 ribu jiwa dan sebagian besar penduduknya tergolong miskin. Selanjutnya, pada bulan September tahun 2019 informasi terbaru dari (Effendi, 2019) sebanyak 49 desa di Kabupaten Purbalingga masuk kategori zona merah kemiskinan, kondisi tersebut membuat Kabupaten Purbalingga masuk dalam peringkat ke-5 Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1

**Tabel Indikator Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun
2015-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	176.49	171.78	171.90	144.16
Persentase Penduduk Miskin	19.70	18.98	18.80	15.62
Indeks Kedalaman Kemiskinan	3.37	3.85	2.79	2.79
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.85	1.20	0.68	0.74
Garis Kemiskinan (rupiah/Kapita/Bulan)	283.366	301.862	313.343	324.735

Sumber : (Statistika)

Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penduduk miskin yang tercatat di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan, setelah itu 2016-2017 mengalami kenaikan dan 2017-2018 mengalami penurunan. Penduduk miskin sering dipandang sebagai kurangnya masalah terhadap keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk dapat dikategorikan miskin adalah ketika ia memiliki rata-rata pengeluaran dalam per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ada dua yakni, berasal dari makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan muncul karena kurangnya mendapatkan makanan yang kurang bergizi dan garis kemiskinan non makanan muncul karena kurangnya kebutuhan sandang, kesehatan, dan Pendidikan.

Indeks kedalaman kemiskinan yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin pada garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka pendapatan rata-rata orang makin jauh dari garis kemiskinan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan yang artinya tingkat pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan, dari 2016-2017 mengalami penurunan yang artinya semakin mendekati garis kemiskinan, sedangkan nilai pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017. Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dari tahun 2015-2016 nilai indeks meningkat artinya sebaran nilai pengeluaran penduduk semakin tinggi, pada tahun 2016-2017 nilainya menurun yang artinya sebarannya semakin rendah, sedangkan pada tahun 2018 nilai indeks kembali meningkat.

Penting adanya optimalisasi sumber daya manusia dengan adanya kegiatan ataupun perubahan agar setiap tahun tingkat kemiskinan berkurang. Banyaknya objek wisata alam yang ada di Kabupaten Purbalingga, dengan melakukan usaha bisa menjadikan pengurangan adanya tingkat kemiskinan. Usaha tersebut bisa dengan membuka lapak usaha di area wisata alam atau bisa dengan berjualan di area pintu masuk objek wisata alam.

Dalam kegiatan infrastruktur Kabupaten Purbalingga di antaranya yaitu membuka aksesibilitas wilayah dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan, melanjutkan bangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), membangun *Islamic Centre* dan Lingkungan Industri Kecil (LIK) logam, dan

penyediaan irigasi dan air minum pedesaan, pembangunan yang sedang diproses Bandara Jenderal Besar Soedirman. Pada pembangunan *Islamic Centre* menyesuaikan dengan adanya keuangan daerah, maka dari itu pembangunan dilakukan secara bertahap.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah, mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi objek wisata alam dan faktor penghambat dan faktor pendorong perekonomian daerah dengan adanya objek wisata alam yang ada di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Dengan uraian latar belakang seperti di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Objek Wisata Alam Terhadap Perekonomian Daerah”**

Penelitian ini merupakan replikasi pengembangan dari penelitian (Ahmad, 2017). Terdapat adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dilakukan di lokasi Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian dan dilakukan pada tahun 2017. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini berfokus pada objek wisata alam dan menambahkan perekonomian daerah. Alasan peneliti ingin menambahkan perekonomian daerah tersebut yaitu karena perekonomian Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu masalah yang diperhatikan pada pemerintah sehingga relevan dilakukan untuk sebuah penelitian.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memiliki batasan masalah, yaitu:

1. Studi pada Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
2. Kontribusi retribusi objek wisata alam sebagai sumber pendapatan asli daerah.
3. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi objek wisata alam.
4. Penelitian ini hanya untuk perekonomian Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi retribusi objek wisata alam sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi objek wisata alam di Kabupaten Purbalingga?
3. Apa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga dalam objek wisata alam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi objek wisata alam sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi objek wisata alam di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong terhadap perekonomian dalam objek wisata alam di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau dapat dijadikan bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pendapatan asli daerah dari retribusi objek wisata, kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan literatur bahan kajian untuk para penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan tentang hubungan pendapatan asli daerah dari retribusi objek wisata alam dikhususkan di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat berguna terkhusus bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui hubungan pendapatan asli daerah dari retribusi objek wisata alam terhadap perekonomian daerah.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan retribusi objek wisata pada

pendapatan asli daerah terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat dijadikan informasi bagi masyarakat mengenai adanya retribusi objek wisata alam pada pendapatan asli daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengevaluasi kinerja pemerintah.